



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129,
Telepon (0751) 31401, 31402, 34425,
Laman sumbarprov.go.id, Pos-el setda@sumbarprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 812/6341/BKD/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 untuk mengisi 1.300 (seribu tiga ratus) formasi, rincian formasi dapat diakses di <https://bit.ly/46f73KU> (Formasi Provinsi Sumatera Barat).

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Bagi PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis
 - a. Khusus
Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:
 - Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN), pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - b. Umum
Pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Bagi PPPK Tenaga Guru
 - a. Khusus
 - Pelamar Prioritas, peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara;
 - Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - b. Umum
 - Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
10. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam surat edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
4. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
5. Bagi pelamar PPPK Tenaga Guru, pelamar Guru non ASN wajib memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun, pelamar umum Guru yang terdaftar di Dapodik wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, dan Lulusan Pendidikan Profesi guru (PPG) wajib melampirkan bukti bahwa pelamar adalah Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Bagi pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
7. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan PPPK ini adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* pada laman resmi BKN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada laman tersebut;
3. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar;
4. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada SSCASN masing-masing;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan PPPK sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
7. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

8. Pelamar mengisi data;
9. **Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas;**
10. Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. **Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;**
11. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2023, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan warna** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat Lamaran **diketik** yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ditandatangani serta dibubuhi **meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat lamaran telampir);
3. **Pas foto close up terbaru** berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: **melampirkan ijazah S.1 dan Profesi**;
 - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. **Pendidikan Profesi wajib melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi**;
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik yang ditandatangani oleh pelamar dibubuhi **meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat pernyataan terlampir);
7. STR bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan, sesuai dengan point IV angka 3 di atas;
8. Surat Keterangan memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan yang dilamar ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan poin IV angka 4 dan angka 5 di atas;
9. Bagi PPPK Tenaga Guru melampirkan Surat Keterangan memiliki pengalaman dengan menggabungkan pada Surat Lamaran;
10. Bagi Lulusan PPG wajib melampirkan bukti bahwa pelamar adalah Lulusan PPG dengan menggabungkan pada Ijazah;
11. Khusus bagi penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran di atas ditambah dengan:
 - a. Melampirkan surat keterangan Asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
12. Jika dokumen yang diunggah bukan dokumen asli, tidak berwarna, tidak lengkap, tidak jelas/tidak dapat dibaca, dan tidak sesuai format, maka **dianggap tidak memenuhi syarat**.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;

- 2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, dan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usulan Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>

IX. LAIN-LAIN

- 1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
- 2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- 3. Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- 4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- 5. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi pada laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>;

6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat menghubungi *Call Center* pada nomor **0821 3619 5412** setiap hari kerja pukul 08.00- 16.00 WIB;
7. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman dan dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.



CONTOH SURAT LAMARAN

Padang,
Kepada
Yth : Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat
di-
Padang

2023

Perihal : Lamaran menjadi Calon Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Tenaga Guru/
Kesehatan/Teknis*

Lampiran : 1 (satu) berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a

:

Tempat/Tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Agama

:

Status Perkawinan

:

Alamat

:

Formasi yang dilamar

:

Nomor HP

:

Alamat Email

:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru / Teknis / Kesehatan* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2023.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini terlampir sebagai berikut :

1.

Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah
2.

Ijazah dan Transkrip Nilai
3.

Sertifikat Keahlian Tertentu (untuk jabatan yang mempersyaratkan)**
4.

Surat Tanda Registrasi
5.

Surat Pernyataan 5 (lima) point
6.

Surat Keterangan Pengalaman Kerja
7.

Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas (bagi pelamar disabilitas)*

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan harapan Bapak dapat mengabulkannya. Atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai Rp. 10.000

Pelamar

Catatan :

* Pilih Jabatan PPPK yang dilamar

** Dilampirkan bagi jabatan yang dipersyaratkan

Menggunakan meteria elektronik Rp. 10.000

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

e-meterai Rp. 10.000

.....

Catatan :

Menggunakan meterai elektronik Rp. 10.000

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATA TAHUN ANGGARAN 2023**

FORMASI TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	KEAHLIAN	FORMASI DISABILITAS
1	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; D-IV TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN/PERAIRAN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN; D-IV PERIKANAN; D-IV TEKNOLOGI PANGAN	3	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	UMUM	-	0
2	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 KOMUNIKASI; S-2 ANTROPOLOGI/SOSIOLOGI; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN, SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA	UMUM	-	1
3	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 ILMU PEMERINTAHAN; S-2 HUKUM; S-2 ADMINISTRASI NEGARA; S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN, SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	UMUM	-	1
4	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 ANTROPOLOGI/SOSIOLOGI	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN, SUB BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	UMUM	-	0
5	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 ILMU EKONOMI; S-2 PERENCANAAN WILAYAH	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH FISIK DAN PRASARANA	UMUM	-	0
6	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI, SUB BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	UMUM	-	0
7	AHLI PERTAMA -PENELITI	S-2 SISTEM INFORMASI	1	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI, SUB BIDANG DISEMINASI KELITBANGAN	UMUM	-	0
8	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 BIOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	4	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PANGAN, UPTD BALAI PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN DINAS PANGAN, SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PANGAN	UMUM	-	0
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN; S-1 PERIKANANTANGKAP; S-1 PERMESINAN PERIKANAN; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN; S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN TANGKAP, SEKSI KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT TANGKAP IKAN	UMUM	-	0
10	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 HUKUM PERDATA	3	SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA, BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, KASUBAG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah	0
11	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN	UMUM	-	0
12	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP, SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	UMUM	-	0

13	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP, SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		-	0
14	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN; S-1 BIOLOGI	3	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN UPTD BPTPH	UMUM	-	0
15	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN; S-1 BIOLOGI	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), SEKSI PRASARANA PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA UPTD BPTPH	UMUM	-	0
16	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU KOMUNIKASI; D-IV JURNALISTIK; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	2	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	UMUM	-	0
17	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU KOMUNIKASI; D-IV JURNALISTIK; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, SEKSI PENYELENGGARAAN PUBLIK	UMUM	-	0
18	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ILMU KOMUNIKASI; D-IV JURNALISTIK; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU JURNALISTIK; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	4	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, SEKSI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	UMUM	-	0
19	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN INFORMATIKA	KHUSUS	-	0
20	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	KHUSUS	-	0
21	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KHUSUS	-	0
22	AHLI PERTAMA - STATISTISI	D-IV STATISTIKA; S-1 STATISTIK	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG STATISTIK SEKTORAL, SEKSI STATISTIK SEKTOR PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	UMUM	-	0
23	AHLI PERTAMA - STATISTISI	D-IV STATISTIKA; S-1 STATISTIK	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, BIDANG STATISTIK SEKTORAL, SEKSI STATISTIK SEKTOR EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	UMUM	-	0
24	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN; D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN; D-III KEARSIPAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	UMUM	-	0

25	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KABID KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, KASI PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN	UMUM	-	0
26	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD RUMAH SAKIT HEWAN, KASI KLINIK	UMUM	-	0
27	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; D-III PERLINDUNGAN TANAMAN	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BTPH), SEKSI PRASARANA PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA UPTD BTPH	UMUM	-	0
28	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI	1	SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA, BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	UMUM	-	0
JUMLAH			43				2



**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATA TAHUN ANGGARAN 2023**

FORMASI GURU

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	36	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
2	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
3	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
4	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	7	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
5	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	14	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	33	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	12	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
9	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
10	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	96	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
11	AHLI PERTAMA - GURU BROADCASTING DAN PERFILMAN	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
12	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	8	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
13	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
14	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	15	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
15	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	7	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
16	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	70	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
17	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	18	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
18	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	48	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
19	AHLI PERTAMA - GURU IPA	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
20	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
21	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
22	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
23	AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
24	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	14	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
25	AHLI PERTAMA - GURU LAYANAN KESEHATAN	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
26	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	29	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
27	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	66	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
28	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
29	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
30	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	8	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
31	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	98	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
32	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	2
33	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	27	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	18
34	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	8	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
35	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
36	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	177	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
37	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
38	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	41	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
39	AHLI PERTAMA - GURU SENI RUPA	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
40	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	11	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
41	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL NIAGA	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
42	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
43	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	21	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0

44	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK FURNITUR	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
45	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
46	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
47	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	15	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	2
48	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	12	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
49	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
50	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
51	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	2
52	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	11	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	
53	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	10	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
54	AHLI PERTAMA - GURU TIK	23	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
55	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
JUMLAH		1150			24



**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATA TAHUN ANGGARAN 2023**

FORMASI KESEHATAN

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	26799	RSU PARIAMAN	KHUSUS	0
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	26799	RSU PARIAMAN	UMUM	0
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	26801	RS PARU SUMATERA BARAT	UMUM	0
8	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
9	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	3	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
10	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0
11	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
12	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
13	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	26801	RS PARU SUMATERA BARAT	UMUM	0
14	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
15	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0
16	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	3	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
17	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
18	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	5	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	KHUSUS	0
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	KHUSUS	0
21	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	39927	BALAI PENGobatan / KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	UMUM	0
22	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	2	26801	RS PARU SUMATERA BARAT	UMUM	0
23	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	129	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KHUSUS	0
24	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
25	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0
26	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
27	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
28	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	3	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0

29	AHLI PERTAMA - TEKNI ELEKTROMEDIS	1	26801	RS PARU SUMATERA BARAT	UMUM	0
30	AHLI PERTAMA - TEKNI ELEKTROMEDIS	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
31	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KHUSUS	0
32	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	KHUSUS	0
33	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	26799	RSU PARIAMAN	UMUM	0
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	26842	RSUD M. NATSIR	KHUSUS	0
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	26799	RSU PARIAMAN	KHUSUS	0
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	116	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KHUSUS	0
37	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	2	26842	RSUD M. NATSIR	KHUSUS	0
38	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	2	26799	RSU PARIAMAN	KHUSUS	0
39	TERAMPIL - BIDAN	2	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR		0
40	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1	26842	RSUD M. NATSIR	KHUSUS	0
41	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	2	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
42	TERAMPIL - NUTRISIONIS	4	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
43	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1	26799	RSU PARIAMAN	UMUM	0
44	TERAMPIL - PERAWAT	1	1228	BBPK, BAPELKES/BAPELKESNAS BAPELKES PROVINSI SUMATERA BARAT	UMUM	0
45	TERAMPIL - PERAWAT	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	KHUSUS	0
46	TERAMPIL - PERAWAT	2	26801	RS PARU SUMATERA BARAT	KHUSUS	0
47	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	KHUSUS	0
48	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	39927	BALAI PENGOBATAN / KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	KHUSUS	0
49	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	KHUSUS	0
50	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	26842	RSUD M. NATSIR	KHUSUS	0
51	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	6	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	KHUSUS	0
52	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	129	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KHUSUS	0
53	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	KHUSUS	0
54	TERAMPIL - TEKNI ELEKTROMEDIS	2	39927	BALAI PENGOBATAN / KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	UMUM	0
55	TERAMPIL - TEKNI ELEKTROMEDIS	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
56	TERAMPIL - TEKNI ELEKTROMEDIS	1	26842	RSUD M. NATSIR	UMUM	0

57	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	UMUM	0
58	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	26822	RUMAH SAKIT RSJ PROF.DR.HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA	UMUM	0
59	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	1	26847	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR	KHUSUS	0
60	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	2	26799	RSU PARIAMAN	UMUM	0
TOTAL		107				0



CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal : Lamaran menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru/ Kesehatan/Teknis*

Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang, 2023
Kepada
Yth : Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat
di-
Padang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a

Tempat/Tanggal lahir

Pendidikan

Agama

Status Perkawinan

Alamat

Formasi yang dilamar

Nomor HP

Alamat Email

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru / Teknis / Kesehatan* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2023.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini terlampir sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah

2. Ijazah dan Transkrip Nilai

3. Sertifikat Keahlian Tertentu (untuk jabatan yang mempersyaratkan)**

4. Surat Tanda Registrasi

5. Surat Pernyataan 5 (lima) point

6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja

7. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas (bagi pelamar disabilitas)*

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan harapan Bapak dapat mengabulkannya. Atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai Rp. 10.000

Pelamar

Catatan :

* Pilih Jabatan PPPK yang dilamar

** Dilampirkan bagi jabatan yang dipersyaratkan

Menggunakan meteria elektronik Rp. 10.000

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

e-meterai Rp. 10.000

.....

Catatan :

Menggunakan meterai elektronik Rp. 10.000